

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MASALAH
KEMISKINAN DI KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONE



BOSOWA

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian
Studi pada Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas
Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

OLEH

ERNI GENDA

No. Stb : 45 86 06 0087

No. Nirm : 87 113 9844

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MASALAH
KEMISKINAN DI KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONE



OLEH

ERNI GENDA

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Hukum Masyarakat
dan Pembangunan

pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

1991

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan rahman serta rahim-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini telah dapat kami selesaikan sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan serta rintangan, yang penulis yakin adalah semua itu hanyalah ujian dari pada-Nya yang hendak menguji ketabahan dan keyakinan penulis. Namun berkat Rahmat dan Inayah-Nya jualah maka segala rintangan dan tantangan itu dapat penulis lalui sekalipun menumpahkan keringat dan air mata. Disamping itu pula bahwa apa yang telah penulis buat ini merupakan suatu usaha maksimal yang patut penulis banggakan dalam hati.

Satu hal yang penulis juga sadari sepenuhnya bahwa apa yang telah penulis uraikan dalam isi skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sehingga masih jauh dari pada kesempurnaan. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri yang masih dalam tahap belajar, sehingga menuntut penulis untuk lebih banyak lagi belajar dan belajar sekali lagi adalah belajar.

Demikian pula bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah tidak terlepas dari partisipasi berbagai

pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini izinkanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H. dan Ibu Siti Zubaidah, S.H. masing-masing selaku konsultan I dan II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas 45 Ujung Pandang yang telah banyak memberikan kebijaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Ujung Pandang yang telah memimpin Fakultas selama penulis menuntut ilmu pada fakultas itu.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis yang dapat dijadikan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan selanjutnya.
5. Kepada Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Palakka Kabupaten Bone beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di wilayah pemerintahannya.
6. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Bone yang telah memberikan keterangan-keterangan yang penulis butuhkan.
7. Kepada rekan-rekan yang juga banyak memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

8. Dan akhirnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak berkorban baik materil maupun sprituil kepada penulis sejak penulis masih berada dalam ayunan hingga sekarang ini.

Demikianlah ucapan terimakasih yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak di atas, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan petunjuk kepada kita sekalian, amin..

Ujung Pandang, 1991

Penulis,

BOSOWA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pernyataan Masalah	5
1.3. Metodologi	5
1.4. Komposisi Bab	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA MASALAH KEMISKINAN	10
2.1. Kriteria Masyarakat Miskin.....	10
2.2. Kriteria Masalah Kemiskinan	14
BAB 3 TINJAUAN UMUM KECAMATAN PALAKKA DAN KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN PALAKKA KAB BONE	18
3.1. Faktor Geografis Kec. Palakka Kab. Bone...	18
3.2. Faktor Demografis Kec. Palakka Kab. Bone..	25
3.3. Potensi Kecamatan Palakka Kab. Bone	31
3.4. Kemiskinan di Kecamatan Palakka Kab. Bone.	42
3.5. Faktor Penyebab Timbulnya Kemiskinan di Ke- camatan Palakka Kab. Bone	45
BAB 4 ANALISIS DAMPAK KEMISKINAN DI KEC. PALAKKA KAB BONE	
4.1. Kemiskinan Sebagai Sumber Kejahatan di Ke- camatan Palakka Kab. Bone	48

4.2. Kemiskinan Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Palakka Kab. Bone	52
4.3. Hukum Sebagai Salah Satu Pemecahan Masalah Kemiskinan dan Kejahatan di Kec. Palakka	57
BAB 5 P E N U T U P	
5.1. Kesimpulan	68
5.2. S a r a n	69
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	hal
III 1	LUAS TANAH MENURUT KECAMATAN DAN PENGGUNAANNYA DI KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE TAHUN 1988 / 1990	21
III 2	JUMLAH JENIS TANAH DAN FREKWENSI PENANAMAN PADI DI KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE TAHUN 1988 / 1990	24
III 3	JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PALAKKA DIRINCI MENURUT, DEWASA, ANAK-ANAK DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1988	26
III 4	TINGKAT PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 1988	28
III 5	TINGKAT PENGANGGURAN DI KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984 - 1988	30
III 6	LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI PADI DI KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984 - 1988	32
III 7	LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI JAGUNG DI KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984 - 1988	34
III 8	LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI KACANG KEDELEL KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984-1988	35
III 9	LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI UBI JALAR KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984 - 1988	38
III 10	LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI KACANG TANAH KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984 - 1988..	40
IV 1	JUMLAH NARA PIDANA YANG BERASAL DARI KECAMATAN PALAKKA DIRINCI MENURUT SEBAB-SEBAB MELAKUKAN KEJAHATAN	51
IV 2	PERTUMBUHAN PDRB KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1986 - 1988	54

B A B 1

P E N D A H U L U A N



1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis bahwa masalah sosial adalah hal yang umum, dimana setiap negara akan menghadapi hal seperti ini, terlebih lagi bagi negara-negara berkembang, seperti negara kita yang pada saat ini masih dalam tahap pembangunan, sebagai masalah sosial merupakan hal yang rawan. Oleh karena itu hal seperti ini dijadikan sebagai salah satu bahan masalah dalam rencana pembangunan itu sendiri yang disusun dalam suatu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi patokan untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan dengan sasaran tertentu tiap lima tahun, termasuk di dalamnya adalah masalah kemiskinan secara khusus.

Untuk dapat melihat bagaimana bentuk dari permasalahan sosial itu, adalah tidak terlalu mudah karena mempunyai kaitan antara beberapa faktor tertentu. Oleh karenanya, diperlukan suatu ketajaman analisis untuk dapat menghubungkan antara beberapa faktor tersebut. Disamping itu, juga untuk mendapatkan pokok permasalahan yang sebenarnya, maka segala faktor pendukung tersebut haruslah dapat diintegrasikan antara satu dengan

lainnya.

Seperti kemiskinan yang dapat menghambat pembangunan nasional, sebenarnya tidak hanya menyangkut masalah pembangunan, tetapi juga menyangkut masalah manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfian dalam bukunya Transformasi Sosial Budaya (1984 : 19) mengatakan bahwa :

"Masalah sosial adalah masalah yang kompleks, oleh karena tidak hanya menyangkut dalam pembangunan tetapi juga menyangkut manusia-manusia sebagai pendukung pembangunan itu sendiri"

Dengan demikian kemiskinan adalah menjadi masalah sosial. Pada masyarakat yang masih bersifat agraris atau tradisional seperti yang terdapat pada masyarakat di daerah-daerah pedesaan, kemiskinan belumlah dirasakan sebagai masalah sosial. Tetapi dengan adanya perkembangan disatu sisi yang menghendaki perubahan-perubahan baik pada masyarakat kota maupun pada masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan kemiskinan di daerah pedesaan dapat menjadi faktor adanya tingkat urbanisasi yang tinggi yang pada dasarnya akan merusak tatanan masyarakat kota maupun masyarakat desa.

Dalam hubungannya dengan kejahatan, kemiskinan merupakan salah satu sebab timbulnya beberapa kejahatan

seperti terjadinya pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain-lain.

Untuk itulah, khususnya di daerah pedesaan masih banyak kita jumpai masyarakat yang berada di bawah standar kelayakan hidup pada masa sekarang ini. Sehingga perlu segera mendapat perhatian secara serius dari semua pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait. Karena apabila hal ini dibiarkan, maka menimbulkan adanya kemiskinan tadi. Dengan demikian suatu problem sosial akan menimbulkan problem sosial lainnya. Inilah yang disebut Manifest Social Problem.

Namun yang jelas bahwa masalah sosial, khususnya kejahatan yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan adalah dapat menghambat pembangunan nasional yang pada awalnya merusak tatanan masyarakat dimana kemiskinan itu berada.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mencoba mengangkat suatu permasalahan kemiskinan sebagai salah satu sumber kejahatan dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEMISKINAN PADA MASYARAKAT KECEMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE". Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah didasarkan pada beberapa alasan tertentu, juga terhadap pemilihan lokasi peneliti-

an, yaitu di Kecamatan Palakka seperti berikut ini :

1. Bahwa permasalahan sosial yang dihadapi oleh negara kita merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang justru dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Demikian pula halnya dengan Kecamatan Palakka yang menghadapi permasalahan sosial, khususnya masalah kemiskinan, dimana mempengaruhi pertumbuhan daerah tersebut di dalam pembangunannya.
2. Bahwa akibat langsung yang dapat dirasakan sebagai konsekwensi dari masalah kemiskinan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan sebagainya yang pada dasarnya didorong oleh tekanan ekonomi.
3. Dengan danya permasalahan tersebut penulis merasa terpanggil untuk memberikan sumbangan pemikiran agar kiranya masalah kemiskinan di Tanah Air kita, khususnya di Kecamatan Palakka Kabupaten Dati II Bone dapat memberikan masukan-masukan yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Dan lebih penting lagi adalah menyangkut tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang tujuan pembangunan nasional yang ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut serta menciptakan suatu masyarakat yang dicita-citakannya itu.

5. Demikian pula bahwa khususnya di Kecamatan Palakka yang masyarakatnya sebagian besar adalah petani yang hanya memiliki lahan sawah seluas 0,3 sampai 0,5 hektar adalah dapat dikatakan tidak memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Juga bahwa akibat keadaan yang miskin itu dan adanya keadaan yang mendesak dapat mengakibatkan timbulnya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, seperti kejahatan.

1.2. Pernyataan Masalah

Dari judul di atas, akan tergambar suatu pengertian yang gak luas tentang masalah kemiskinan. Dalam hal ini penulis akan membatasi terhadap persoalan yang mempunyai hubungan secara langsung, yakni masalah kamiskinan yang dapat menimbulkan kejahatan, dimana masalah ini juga akan dibatasi dalam bentuk pernyataan masalah seperti di bawah ini :

1.2.1 Sejauh manakah masalah kemiskinan menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone ?.

1.3. Metodologi

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode/cara yang sesuai dengan obyek atau sasaran penulis masalah yang telah

disebutkan di atas. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1.3.1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

pada metode ini, penulis akan membaca literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan materi skripsi ini, untuk dijadikan sebagai landasan teori yang dapat diintegrasikan dengan data serta keterangan-keterangan yang telah didapatkan di dalam penelitian lapangan.

1.3.2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dengan metode ini penulis akan mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian guna mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini, penulis lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Observasi ; yakni penulis akan mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah kemiskinan dan kejahatan yang mana menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.
- b. Wawancara ; yakni penulis akan mengadakan wawancara terhadap pejabat dari beberapa instansi yakni: Kepala Kantor Lembaga Pemasarakatan, Kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan palakka, dan beberapa tokoh masyarakat serta beberapa orang sebagai pelaku kejahatan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Dengan

demikian dapat diperinci jumlah responden seperti berikut ini :

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) Kepala Lembaga Pemasarakatan | 1 orang . |
| b) Kepala Kecamatan Palakka | 1 orang . |
| c) Masyarakat dari golongan lemah | 35 orang . |
| d) Tokoh masyarakat | 5 orang . |
| e) Pelaku kejahatan | 10 orang . |

Jadi jumlah seluruh responden 52 orang.

1.3.3. Pengolahan Data

Metode ini digunakan untuk mendapatkan hubungan-hubungan antara beberapa faktor tertentu yang selanjutnya mengambil suatu kesimpulan akhir dari hubungan-hubungan tersebut. Dalam pengolahan data ini digunakan cara analisis deskriptif.

1.4. Komposisi Bab

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab serta sub bab, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini dapat dilihat susunan bab skripsi ini :

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang Masalah, kemudian dipaparkan pernyataan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya merupakan suatu uraian

pula Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini guna mendapatkan data dan keterangan - keterangan yang diperlukan. Dan terakhir akan di paparkan komposisi bab, dimana digambarkan isi secara keseluruhan skripsi ini.

Bab kedua akan diuraikan beberapa hal dalam suatu tinjauan pustaka masalah kemiskinan dengan menjelaskan kriteria masyarakat miskin, kemudian dijelaskan pula tentang kriteria masalah kemiskinan. Pada bab ini akan diketahui apa yang menjadi ciri-ciri dari suatu masyarakat yang dikatakan miskin dan ciri-ciri dari suatu masalah kemiskinan.

Bab ketiga merupakan bab yang akan menguraikan suatu Tinjauan Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dengan menguraikan Faktor Demografis Kecamatan Palakka kemudian diuraikan pula Faktor Demografis serta potensi Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Selanjutnya akan diuraikan pula mengenai kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Palakka serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan itu.

Bab keempat adalah bab yang akan menguraikan inti permasalahan skripsi ini dengan menjelaskan Analisis Dampak Kemiskinan di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu : kemiskinan sebagai sumber kejahatan di Kecamatan Palakka, kemudian dijelaskan pengaruh keberhasilan pembangunan di-

Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Dan terakhir dari bab ini akan diuraikan suatu pemecahan masalah kemiskinan dan kejahatan melalui hukum di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi ini, dimana akan diuraikan kesimpulan penulis terhadap permasalahan skripsi, kemudian akan dipaparkan pula beberapa saran penulis di dalam menghadapi dan memecahkan masalah kemiskinan di Kecamatan Palakka.



B A B 2

TINJAUAN PUSTAKA MASALAH KEMISKINAN

2.1. Kriteria Masalah Masyarakat Miskin

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan termasuk dalam permasalahan pembangunan nasional. Namun demikian sampai pada penjelasan ini belum diketahui apa sebenarnya yang dimaksud kemiskinan itu. Pada penjelasan-penjelasan berikut ini akan dijelaskan pengertian kemiskinan serta apa yang menjadi kriteria dari suatu masyarakat / seseorang dapat dikatakan miskin ?, Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan mengenai standar kemiskinan berdasarkan pada beberapa literatur.

Masalah dapat diartikan bila sesuatu yang seharusnya atau yang diinginkan bertentangan dengan apa yang terjadi. Dalam hal ini kita mengenal juga dalam dunia ilmu hukum yakni apa yang seharusnya (Das Sollen) dan apa yang terjadi kenyataan (Das Sein). Jadi masalah merupakan suatu pertentangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Timbulnya suatu masalah atau terjadinya suatu masalah jika apa yang diinginkan terdapat perbedaan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang justru terjadi.

Selanjutnya kemiskinan dapat diartikan sebagai su

atu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan utamanya. Berdasarkan standar internasional dikatakan bahwa jika seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhannya berupa pangan, sandang dan papan maka seseorang tersebut berada dalam keadaan miskin. (Soerjono - Soekanto, 1986 : 354).

Sebenarnya pengertian di atas masih belum jelas tentang standar terendah dari ukuran sandang, pangan, dan papan. yang harus terpenuhi. Karena terdapat beberapa orang yang dikatakan miskin tetapi memiliki pangan, sandang dan papan. Dalam hal ini, menurut standar internasional jika seseorang telah mampu mencukupi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan secara layak maka seseorang tersebut tidaklah dikatakan miskin. Jadi pada dasarnya terdapat standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehingga seseorang tersebut tidak dikatakan miskin.

Namun demikian akan timbul pertanyaan lagi mengenai standar kelayakan itu sendiri, yakni sampai dimana-kah suatu standar kelayakan itu dapat dikatakan miskin, atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa pada masyarakat modern mungkin pada standar tertentu dikatakan masih berada dalam keadaan miskin, tetapi untuk masyarakat se derhana atau tradisional pada standar tertentu tadi sudah dapat mencukupi kebutuhannya.

Menurut hemat penulis bahwa untuk seorang petani dapat dikatakan hidup berkecukupan apabila petani tersebut mampu menghasilkan beras sebanyak 2,0 ton beras setahun. Kalau menurut harga yang berlaku, maka jumlah tersebut sebesar Rp. 900.000,- sampai Rp 1.000.000,- pertahun .

Standar diatas merupakan yang terendah, yaitu baru dikatakan cukup dibidang pangan . Belum lagi sandang dan papan yang juga harus memenuhi standar kelayakan . (Ir. Entang Sastraatmadja ; 1985 ; 28)

Lebih lanjut dikatakan oleh Entang Sastraatmadja, bahwa disisi lain para ahli mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan kecukupan apabila ia mampu mengkonsumsi beras sebanyak 320 kg pertahun . Ini berarti jika ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku maka jumlah tersebut sebesar Rp 144.000,- ukuran ini juga berdasarkan perhitungan terendah .

Menurut penulis sendiri bahwa standar kelayakan yang dimaksud disini adalah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan - kebutuhan hidup sekarang ini . Artinya seseorang dikatakan miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan - kebutuhan hidupnya yang pokok dengan perhitungan kelayakan hidup sekarang ini . Hal ini bukan berarti standar kelayakan dengan kebutuhan - kebutuhan hidup masing-masing orang disesuaikan , karena dengan demikian hal -

itu menjadi ukuran maka tidak ada seorangpun yang merasa sudah berkecukupan. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang ini sehingga seseorang dapat dikatakan berada dalam standar kemakmuran terendah atau hidup sejahtera berdasarkan ukuran materiil.

Atau dengan kata lain bahwa seseorang tidak dikatakan miskin jika mampu memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan yang paling sederhana menurut ukuran dewasa ini.

Dengan demikian sudah jelas bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan secara layak menurut ukuran yang paling sederhana untuk sekarang ini.

Namun demikian ukuran-ukuran seperti seorang petani yang harus menghasilkan beras 2,0 ton pertahun dan 320 kg beras harus dapat dikonsumsi dalam setahun untuk tidak dikatakan berada dibawah standar kehidupan dapat pula dijadikan standar-standar tertentu dalam mengukur tingkat kemiskinan seseorang atau suatu masyarakat.

2.2. Kriteria Masalah Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.


Memang usaha untuk menghapus kemiskinan di pedesaan merupakan tantangan yang besar. Sekalipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapai hasil penting kebijaksanaan yang berorientasi pada pemerataan, namun di negara ini pada tahun 2000 masih akan ditemui banyak anggota masyarakat, khususnya di Kecamatan Palakka yang hidup di bawah garis kemiskinan. (SH 28 Agustus 1982, Hal. 1 Kol. 2).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mubiarto (1988 : 23) bahwa :

"Yang paling penting atau dibutuhkan dalam menyambut datangnya Pelita V adalah mencoba mendatangkan kemakmuran dan meninggalkan kemiskinan pada masyarakat kita"

Apa yang dikemukakan oleh Mubiarto di atas sepatutnya direnungkan dalam-dalam, oleh karena sampai pada akhir Pelita V ini masalah kemiskinan masih tetap menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai, sementara mereka yang menjadi obyek pembicaraan dalam diskusi tersebut masih berada dalam lilitan kemiskinannya.

Bagi seluruh rakyat, istilah pembangunan tampak -



nya sudah bukan merupakan hal baru sama sekali, karena pembangunan ternyata telah cukup memasyarakat dalam kehidupan warga negara kita. Tidak hanya itu, secara teoritis titik puncak idealisme pembangunan adalah terciptanya suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dan betul-betul sejahtera yang merata.

Kemiskinan sering dilihat sebagai bagian dari suatu proses yang universal, oleh karena menyangkut persoalan kemanusiaan yang saling berkait dengan persoalan lain. Para pakar yang menekuni bidang kemiskinan selalu berujar bahwa pemberantasan kemiskinan adalah persoalan yang tak pernah selesai. (Ir. Entang Sastraatmadja, 1985 : 13).

Pendapat lain mengatakan bahwa persoalan kemiskinan merupakan lingkaran setan yang tak berujung pangkal yang diistilahkan oleh Prof. Nurkse sebagai lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle of poverty).

Pendapat diatas adalah didorong oleh suatu kenyataan dimana seseorang yang miskin akan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan itu. Hal ini disebabkan karena untuk memberikan kehidupan pada keluarganya saja sudah tidak cukup belum lagi untuk keperluan lainnya seperti pendidikan bagi anak-anaknya, yang sudah pasti tidak dapat ia tanggulangi sehingga anak-anaknya yang tidak memiliki pendidikan yang cukup serta keterampilan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan akhirnya

anaknyapun menjadi buruh tani seperti orang tuanya. Dan terus secara turun temurun mereka akan berada pada garis kemiskinan.

Namun demikian, sekalipun diketahui bahwa kemiskinan merupakan trauma kemanusiaan yang mencemaskan, tetapi bukan berarti kita harus pesimis untuk menghilangkannya. Karena kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan, musuh pokok pembangunan dan borok pembangunan yang tidak baik dilestarikan.

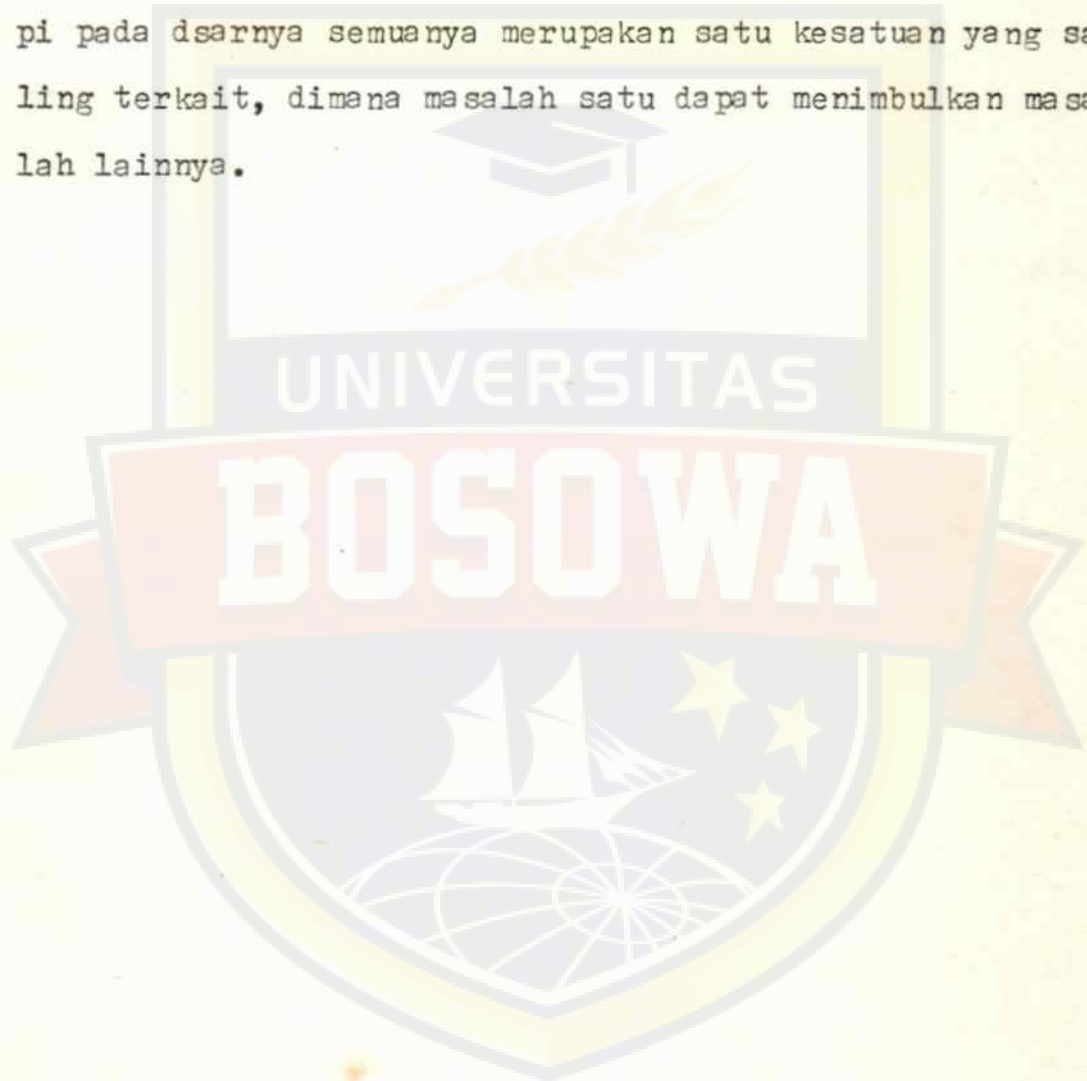
Konsekwensi-konsekwensi yang akan kita temui jika kemiskinan masih tetap bercokol dalam kehidupan negara ini antara lain adalah :

1. Timbulnya Gelandangan
2. Timbulnya Tuna wisma
3. Timbulnya Tuna susila
4. Timbulnya kejahatan.

Semua konsekwensi-konsekwensi tersebut di atas pada dasarnya mempunyai saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Seseorang miskin karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, akhirnya ia menjadi seorang gelandangan yang tidak memiliki rumah, maka jadi lah ia seorang tuna wisma. Dan akibat dari adanya tekanan-tekanan pada kebutuhan-kebutuhan pokoknya mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang sudah jelas adalah melanggar norma-norma yang ada pada masyarakatnya sehingga ia dapat dikatakan melakukan per

buatan asusila.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut jelas bahwa dalam permasalahan sosial sekalipun dapat kita klasifikasi kan masing-masing masalah-masalah sosial tersebut, tetapi pada dasarnya semuanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dimana masalah satu dapat menimbulkan masalah lainnya.



B A B 3

TINJAUAN UMUM KABUPATEN BONE KECAMATAN PALAKKA

3.1. Faktor Geografis Kecamatan Palakka Kab. Bone

Dalam penjelasan berikut ini akan dibahas tentang keadaan alam Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, namun demikian dalam pembahasan tersebut tidak akan membahas Kecamatan Palakka secara tersendiri, tetapi akan dijelaskan pula gambaran Kabupaten Bone secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar dapat membandingkan anantara Kecamatan-kecamatan lain dengan Kecamatan Palakka yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bone. Karena dengan mendapatkan gambaran yang jelas tentang posisi Kecamatan Palakka serta membandingkannya dengan kecamatan-kecamatan lain, maka dapatlah ditarik kesimpulan mengenai keadaan geografis dari Kecamatan Palakka yang juga dapat mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat di Kecamatan tersebut.

3.1.1. Keadaan Alam Kecamatan Palakka.

Kecamatan Palakka merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang terletak dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bone. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Kecamatan di Kabupaten Bone adalah 21 buah, dimana Kecamatan Palakka memiliki ciri tersendiri, terutama sekali dari keadaan geografinya

Kecamatan Palakka dengan Ibu Kota Bulu Tempe, terdiri dari 14 Desa atau Kelurahan dengan jumlah Rukun Kampung (RK) 51 buah dan 176 Rukun Tetangga (RT). Luas tanah keseluruhan di Kecamatan Pallakka adalah 169,00 Km² yang berada pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut.

Sebagaimana daerah-daerah lainnya yang berada di Kabuapten Bone, Kecamatan Palakka adalah termasuk daerah agraris, sehingga pada umumnya tanah-tanah di daerah ini dijadikan tanah persawahan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa luas tanah keseluruhan Kecamatan Palakka adalah 169 Km². Ini berarti jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bone, maka luas Kecamatan Palakka mencapai 3,7 % dari luas Kabupaten. Dengan luas ini Kecamatan Palakka berada pada urutan ke 12 dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

Dari luas tanah secara keseluruhan di Kecamatan Palakka ini, dapat diperinci seperti berikut ini :

1. Tanah Pekarangan/Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya.
2. Tanah Tegal/kebun/ladang/Huma.
3. Tanah Pengembalaan/padang rumput.

4. Tanah Tambak
5. Tanah Kolam / Tebat empang.
6. Tanah yang sementara tidak digunakan
7. Tanah tanaman kayu
8. Tanah tadah hujan
9. Tanah Perkebunan Negara swasta.
10. Tanah lainnya.

Jenis-jenis tanah tersebut di atas merupakan tanah kering serta penggunaannya, Jadi luas tanah kering serta penggunaannya di Kecamatan Palakka adalah 12.445,00 Ha. Jumlah luas tanah kering tersebut adalah 3,3 % dari seluruh jumlah tanah kering yang ada di Kabuapten Bone. Dan untuk lebih jelasnya mengenai luas masing-masing jenis serta penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

T A B E L I I I 1

LUAS TANAH KERING MENURUT KECAMATAN DAN

PENGUNAANNYA DI KECAMATAN PALAKKA DIKABUPATEN

BONE PADA TAHUN 1988 / 1990

No.	JENIS TANAH KERING DANG PENGGUNAANNYA	L U A S (Ha)	P R O S E N T A S E (Ha)
1	Tanah Pekarangan/ tanah untuk perkebunan dan ha lahan sekitarnya	1.239	9,95
2	Tanah Tegai/Kebun, ladang! Huma	8.719,50	70,06
3	Tanah Pengembalaan/ Pa- dang Rumput	41	0,33
4	T a m b a k	-	0
5	Kolam/Tebat Empang	3,50	0,03
6	Tanah Yang sementara ti D= dek digunakan	40	0,32
7	Tanah tanaman kayu/ hu- tan Rakyat	99	0,80
8	Tanah tadah hujan	1.200	9,64
9	Tanah pekerbunan negara Swasta	1.073,70	8,62
10	Tanah lainnya	29,30	0,28

Sumber : Kantor Statistik Kab. Bone.

Berdasarkan keterangan tabel tersebut di atas dapatlah memberikan gambaran kepada kita bahwa tanah kering yang digunakan untuk tanah tegalan/kebun, ladang dan huma sebesar 8.719,50. Ini berarti 70,06 % dari jumlah seluruh tanah kering yang ada di Kecamatan Palakka. Selanjutnya urut-

an kedua menurut penggunaannya pada tanah kering adalah tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya seluas 1.239 atau 9,95 % dari luas tanah kering. Sedangkan urutan ketiga dan keempat masing - masing digunakan untuk tanah tadah hujan dan tanah perkebunan negara swasta seluas 9,64 dan 8,62 % dari seluruh jumlah tanah kering. Dan tanah kering lainnya digunakan untuk tanah pengembalaan/padang rumput, tambak, kolam, tanah yang sementara tidak digunakan dan tanah lainnya seluruhnya tidak mencapai 1 % dari penggunaannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luas tanah kering pada umumnya digunakan untuk tanah tegal/kebun, ladang dan huma. Hal ini juga berarti bahwa dengan adanya luas tanah kering yang digunakan untuk tanah tegalan/kebun, ladang dan huma, maka sudah dapat tergambar mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Palakka.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa daerah Kecamatan Palakka Kabupaten Bone merupakan daerah Agraris, dimana pada umumnya tanah di daerah ini digunakan untuk pertanian. Berikut ini akan dipaparkan mengenai keadaan tanah sawah yang terdiri dari berbagai berbagai jenis seperti berikut ini :

1. Jenis tanah sawah Irigasi Teknis.
2. Jenis tanah Irigasi setengah teknis.

3. Jenis tanah irigasi sederhana/desa.
4. Jenis tanah sawah tadah hujan.
5. Jenis tanah sawah pasang surut.
6. Jenis sawah irigasi non PU.

Dari ke-enam jenis tanah sawah tersebut, yang paling luas di Kecamatan Palakka adalah jenis tanah sawah sederhana/Desa. Kalau kita bandingkan dengan jenis tanah sawah yang berada di Kabupaten Bone maka Kecamatan Palakka merupakan jenis tanah sawah yang terluas. Demikian pula tanah sawah tadah hujan Kecamatan Palakka termasuk mempunyai sawah tadah hujan yang luas.

Untuk jelasnya mengenai luas jenis tanah sawah yang berada di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone berikut ini akan dipaparkan melalui tabel dengan melihat frekuensi penanaman padi pada masing-masing jenis tanah sawah tersebut. Frekuensi penanaman padi pada jenis-jenis tanah sawah yang ada di Kabupaten Bone pada umumnya hanya mencapai satu atau dua kali penanaman padi dalam satu tahun. Tabel berikut ini akan lebih menjelaskan luas dan frekuensi penanaman padi pada tanah sawah di Kecamatan Palakka.

T A B E L I I I 2
 JUMLAH JENIS TANAH SAWAH DAN FREKUENSI
 PENANAMAN PADI DI KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1988

No	JENIS TANAH SAWAH	L U A S (Ha)	FREKUANSI PENANA NAMAN PADI SETA- HUN		%
			SEKALI	DUAKALI	
1	Sawah tadah hujan	3.199	3.179	20	71,80
2	Sawah Pasang surut	-	-	-	0
3	Sawah Irigasi Tek nis	60	35	25	1,34
4	Sawah Irigasi Se tengah teknis	-	-	-	0
5	Sawah Irigasi Se derhana/Desa	1.196	1.016	180	26,86
6	Sawah Irigasi Non PU	-	-	-	0
! Jumlah		! 4.455	! 4.230	! 225	! 100

Sumber : Kantor Statistik Kecamatan Palakka Kab. Bone.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sawah tadah hujan merupakan sawah yang terluas dengan frekuensi penanaman padi dalam satu tahun 99,4 % hanya satu kali. Demikian pula sawah sederhana/desa yang luasnya 1.196 ha dengan luas frekwensi penanaman satu kali adalah 1.016 atau 84,9 % sedangkan selebihnya dapat ditanami samapai dua kali. Sedangkan sawah irigasi teknis hanya sebesar 60 hektar dan dapat ditanami dua kali sebesar 25 ha atau 41,6 % ha.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah sawah baik sawah tadah hujan, sawah irigasi teknis dan sawah irigasi sederhana/Desa pada umumnya hanya sekali setahun frekuensi penanaman padi.

Demikianlah beberapa gambaran tentang keadaan Geografis Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. sebenarnya keadaan geografis Kecamatan Palakka jika digambarkan ke seluruhan cakupannya akan lebih luas, akan tetapi data mengenai keadaan geografis yang dipaparkan di atas adalah dalam rangka menganalisa tingkat penghidupan masyarakat di Kecamatan Palakka dengan maksud untuk mengukur pengaruh faktor geografis terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Disamping itu pula data yang digambarkan adalah hanya menyangkut aspek produksi masyarakat setempat.

3.2. Keadaan Demografis Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Kecamatan Palakka yang berada dalam wilayah Pemerintahan Dati II Bone, merupakan wilayah yang dihuni oleh suku Bugis. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Palakka ini masih diliputi oleh suasana pedesaan dengan berbagai macam tatanan nilai kemasyarakatan yang merupakan budaya sejak zaman nenek moyang suku Bugis.

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Palakka adalah sebesar 39.737 jiwa. Jika dibandingkan dengan

jumlah keseluruhan Kabupaten Bone maka Kecamatan Palakka berada pada urutan ke-4 atau 6,13 % dari jumlah seluruh Kabupaten Bone.

Bila diperincikan jumlah penduduk menurut tingkat dewasa, anak-anak dan jenis kelamin, maka jumlah penduduk dewasa Kecamatan Palakka adalah 9.112 jiwa penduduk laki-laki dan 11.847 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan anak-anak berjumlah 9.235 jiwa penduduk laki-laki dan 9.441 jiwa penduduk perempuan.

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk menurut tingkat dewasa dan anak-anak berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Palakka, berikut ini akan digambarkan dalam bentuk tabel seperti berikut ini :

T A B E L III 3

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PALAKKA
DIRINCI MENURUT, DEWASA, ANAK-ANAK
DAN JENIS KELAMIN PADA TAHUN 1988

No	TINGKAT UMUR	JENIS KELAMIN		PROSENTASE
		L	P	
1	DEWASA	9.112	11.847	
2	ANAK-ANAK	9.235	9.441	
	Jumlah	18.347	21.288	100 %

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dewasa lebih banyak dari jumlah penduduk anak-anak. Jika diperbandingkan antara kedua jumlah tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tingkat tanggungan bagi penduduk dewasa cukup tinggi, atau 53,03 % dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Palakka sedangkan jumlah penduduk anak-anak 46,97 %, atau beban tanggungan 1,12 untuk satu orang penduduk dewasa.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keadaan penduduk Kecamatan Palakka dilihat dari sudut angka an kerja yang ada. Pada tahun 1988 jumlah seluruh angkatan kerja di Kecamatan Palakka adalah sebesar 11.921 jiwa penduduk sedangkan jumlah seluruh penduduk sebesar 39.737 jiwa penduduk. Ini berarti baru 1/3 dari keseluruhan jumlah penduduk kecamatan Palakka yang bekerja.

Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk yang bekerja serta perkembangannya sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, berikut ini akan dipaparkan melalui tabel. Dalam tabel ini juga akan dilihat tingkat prosentase perkembangannya dari tahun 1984-1988.

T A B B E L I I I 4
TINGKAT PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN
JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA 1984- 1988

NO !	TAHUN !	PERKEMBANGAN !	% !	JUMLAH YANG BEKER !	% -
!	!	! ANGK. KERJA !	!	! JA	!
1 !	1984 !	11.140	! - !	10.850	! -
2 !	1985 !	11.174	! 0,30 !	10.844	! 0,05
3 !	1986 !	11.785	! 5,18 !	11.196	! 3,14
4 !	1987 !	11.410	! 3,28 !	10.839	! 3,29
5 !	1988 !	11.921	! 4,23 !	11.611	! 6,64

Sumber : Kantor Kecamatan Palakka Kab. Bone

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 1984 jumlah angkatan kerja 11.140 jiwa, sedangkan yang bekerja sebesar 10.850 orang. Ini berarti jumlah pengangguran di Kecamatan Palakka pada tahun 1984 sebesar 290 atau 2,6 %. Pada tahun 1985 jumlah angkatan kerja sebesar 11.174, terjadi peningkatan 0,30 % dari tahun 1984, sedangkan yang bekerja sebesar 10.844 dengan penurunan jumlah yang bekerja sebesar 0,05 %. Ini berarti tingkat pengangguran pada tahun 1985 terjadi peningkatan sebesar 0,3 % atau menjadi 2,6 %. Pada tahun 1986 jumlah angkatan kerja sebesar 11.785, sedangkan yang berkerja sebesar 11.196. Ini berarti bahwa peningkatan angkatan kerja dari tahun 1985 sebesar 5,18 %, sedangkan penurunan angkatan kerja yang bekerja sebesar 3,14 %. Dengan demikian tingkat pe-

ngangguran pada tahun 1986 meningkat 5,0 %. Dan pada tahun 1987 jumlah angkatan kerja sebesar 11.410 yang berarti terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 3,28 % dari tahun 1986. Sedangkan yang bekerja pada tahun 1987 sebesar 10.839 orang, yang berarti terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja sebesar 360 orang atau 3,29 %. Demikian pula pada jumlah atau tingkat pengangguran pada tahun 1987 sebesar 571 orang atau 5,0 % dari seluruh jumlah angkatan kerja tahun 1987. Dan pada tahun 1988 jumlah angkatan kerja sebesar 11.921 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 511 atau 4,3 % dari tahun 1987. Sedangkan jumlah yang bekerja pada tahun 1988 sebesar 11.611 yang juga terjadi peningkatan sebesar 772 orang atau 6,6 % dari tahun 1987. Dari jumlah angkatan kerja tahun 1988 dengan jumlah yang bekerja maka dapat dilihat tingkat pengangguran sebesar 310 atau 2,6 % dari seluruh jumlah angkatan kerja tahun 1988.

Untuk lebih menjelaskan tingkat pengangguran di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, berikut ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel dengan tingkat persentasenya, seperti berikut ini :

T A B E L III 5
TINGKAT PENGANGGURAN DIKECAMATAN PALAKKA
TAHUN 1984 - 1988

TAHUN	JUMLAH ANG KATAN KERJA (orang)	JUMLAH YG BE KERJA (Org)	JUMLAH PENGAN NGGURAN (org)
1984	11.140	10.850	290
1985	11.174	10.844	330
1986	11.785	11.196	589
1987	11.410	10.839	571
1988	11.921	11.611	310

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Jadi jelas bahwa pada tahun 1984 jumlah pengangguran sebesar 290 orang atau 2,6 % dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 1985 tingkat pengangguran meningkat menjadi 330 orang atau 12,1 %. Kemudian pada tahun 1986 jumlah pengangguran meningkat menjadi 589 atau 43,9 %. Dan pada tahun 1987 jumlah pengangguran menurun yakni sebesar 18 orang atau 5,1 % dari tahun 1986, atau terjadi tingkat pengangguran sebesar 5,0 % dari jumlah seluruh angkatan kerja. Serta pada tahun 1988 jumlah pengangguran 310 orang atau 2,6 %, atau terjadi penurunan tingkat pengangguran 261 orang dari tahun 1987, atau 85 % dari tahun 1987.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Kecamatan Palakka masih cukup tinggi .

3.3. Potensi Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa baik penduduk maupun keadaan alam (geografis) Kecamatan Palakka merupakan faktor-faktor pendukung dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Namun demikian, faktor-faktor tersebut juga merupakan masalah jika tidak diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Seperti faktor jumlah penduduk yang banyak, dimana Kecamatan berada pada urutan ke-4 terbesar jumlah penduduknya di Kabupaten Dati II Bone. Ini berarti faktor tenaga kerja untuk kecamatan tersebut sudah dapat terpenuhi. Tetapi jika jumlah penduduk yang cukup besar itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang memiliki antusias dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya atau dengan kata lain tidak diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat, maka apa yang menjadi potensi tersebut sebenarnya dapat menjadi permasalahan.

Demikian pula dengan faktor geografis yang dapat dikatakan bahwa Kecamatan Palakka memiliki potensi di bidang ini, dimana kekayaan alam yang cukup serta jumlah tenaga kerja yang besar sehingga semua itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Tetapi keadaan alam seperti itu juga dapat berakibat buruk bagi masyarakat karena hal tersebut akan dapat membuat masyarakat bermasabodoh atau bersifat malas.

Untuk dapat melihat potensi yang dimiliki Kecamatan Palakka ini, sebenarnya secara umum telah dijelaskan di atas, namun penjelasan berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor produksi serta hasil produksi Kecamatan tersebut. Karena dengan menjelaskan faktor produksi itu dan hasil produksi akan dapat diketahui pendapatan rata-rata masyarakat dan sekaligus juga dapat mengukur tingkat kemiskinan yang berada di daerah ini.

Oleh karena itu, pertama-tama yang akan dijelaskan adalah produksi padi dengan melihat tabel berikut ini :

T A B E L III 6
 LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI PADI
 DIKECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984-1988

TAHUN	!	LUAS PANEN	!	JUMLAH PRODUKSI PADI
	!	(HA)	!	(TON)
1984	!	4.666	!	21.004
1985	!	1.040	!	4.578
1986	!	4.678	!	20.669
1987	!	4.525	!	19.833
1988	!	4.894	!	23.926

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Melihat tabel tersebut, akan dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa kecamatan Palakka dalam hal

luas panen dan jumlah produksi padi terjadi penurunan baik dari sudut jumlah produksi maupun jumlah luas areal panen sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1987. Peningkatan kedua sektor tersebut terlihat pada tahun 1988. Jika diprosentasikan perkembangan luas panen dan produksi pada tersebut maka pada tahun 1984 jumlah produksi sebesar 21.004 ton dengan luas areal panen sebesar 4.666 ha. Ini berarti rata-rata per hektar hanya mampu memproduksi padi sebesar 4,5 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 1985 luas areal panen sebesar 1.040, terjadi penurunan seluas 3.626 ha dari tahun 1986 sehingga terjadi pula penurunan tingkat produksi padi menjadi 4.578 ton atau sekitar 78,2 %. Kemudian pada tahun 1986 luas areal panen sebesar 4.678 dengan tingkat produksi rata-rata perhektar sebesar 4,42% ton per hektar. Dan pada tahun 1987 luas areal panen sebesar 4.525 yang berarti terjadi lagi penurunan 153 ha dari tahun 1986, sedangkan jumlah produksi padi mencapai 19.833. Dengan menurunnya luas areal panen jumlah produksi padi juga turun sebesar 836 ton atau 4,04 %. Jadi pada tahun 1987 rata-rata produksi per hektar mencapai 4,4 ton. Pada tahun 1988 jumlah areal panen dan produksi meningkat masing-masing sebesar 4.894 ha dan 25.926. Dengan demikian rata-rata produksi padi per hektar adalah

sebesar 4,9 ton.

Berikut ini juga akan dipaparkan tentang luas areal panen dan produksi jagung Kecamatan Palakka dari tahun 1984 samapai dengan tahun 1988 seperti berikut ini :


T A B E L I I I 7
LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI JA
GUNG KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984-1988

TAHUN !	LUAS PANEN (HA)	!	JUMLAH PRODUKSI JA GUNG (TON)
1984 !	1.488	!	2.026
1985 !	1.556	!	2.424
1986 !	2.085	!	3.159
1987 !	2.279	!	3.216
1988 !	1.959	!	3.489

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone

Dari tabel tersebut di atas memberikan gambaran bahwa baik luas panen maupun produksi Jagung terdapat peningkatan sekalipun pada tahun 1988 terjadi penurunan luas panen, namun jumlah produksi meningkat dari tahun 1987.

Kelau diprosentasakan perkembangan luas panen dan jumlah produksi jagung maka didapatkan bahwa pada tahun 1984 luas areal panen sebesar 1.488 dengan jumlah produksi sebesar 2.026 yang berarti se



tiap hektar areal panen mampu menghasilkan 0,7 ton jagung. Pada tahun 1985 jumlah areal panen meningkat menjadi 1.556 atau 68 ha (4,4 %) dari tahun 1984. Sedangkan jumlah produksi sebesar 2.424 ton yang juga mengalami peningkatan sebesar 398 (16,4%) dari tahun 1984. Dengan demikian jumlah produksi jagun per hektar areal panen adalah sebesar 1,6 Ini berarti peningkatan produksi dalam satu hektar sebesar 0,9 %. Pada tahun 1986 luas areal panen sebesar 2.085 dengan jumlah produksi 3.159 ton. Dengan demikian peningkatan luas areal panen sebesar 529 ha (25,4 %) dan produksi sebesar 735 ton (23,3 %) pada tahun 1986. Dan pada tahun 1987 luas areal panen sebesar 2.279 dan produksi sebesar 3.216 ton. Ini berarti rata-rata produksi per hektat sebesar 1,4 ton. Dengan demikian peningkatan luas areal panen pada tahun 1987 sebesar 194 ha (8,5 %) dan peningkatan produksi pada tahun 1987 adalah sebesar 57 ton (1,8 %). Pada tahun 1988 terjadi penurunan luas areal panen seluas 320 ha (14,1 %) dengan jumlah produksi sebesar 3.489 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 273 ton (7,8 %) dari tahun 1987. Rata-rata produksi per hektar luas panen adalah sebesar 1,8 ton.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas,

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat produksi setiap hektar jagung rata-rata 1,4 ton per tahun

Selanjutnya faktor produksi yang penting adalah Luas panen dan produksi Kacang Kedele yang sekarang ini menjadi komoditi ekspor negara kita. Untuk mengetahui jumlah produksi dan luas areal panen Kacang kedele ini, berikut ini akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

T A B E L III 8

LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI KACANG
KEDELE KECAMATAN PALAKKA THN 1984-1988

TAHUN !	LUAS PANEN (HA)	! JUMLAH PRODUKSI KACANG ! KEDELE (TON)
1984 !	14	! -
1985 !	290	! 44
1986 !	364	! -
1987 !	899	! 232
1988 !	3.199	! 655

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam hal luas panen dan produksi Kacang Kedele Kecamatan Palakka sangatlah rendah, dimana pada tahun 1984 luas panen hanya 14 ha dengan jumlah produksi yang tidak diketahui. Dan pada tahun 1985 jumlah atau luas panen seluas 290 ha dengan jumlah produksi sebesar 44 ton, yang berarti rata-rata perhektar

tar menghasilkan 0,6 ton. Dan pada tahun 1986 luas areal panen seluas 364 ha dengan jumlah produksi sebesar tidak diketahui. Sedangkan pada tahun 1987 luas areal panen seluas 899 ha dengan jumlah produksi sebesar 232 ton atau rata-rata perhektar menghasilkan 0,3 ton. Serta pada tahun 1988 luas areal panen Kacang Kedele meningkat menjadi 3.199 ha dengan jumlah produksi sebesar 655 ton atau rata-rata perhektar menghasilkan 0,2 ton.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi Kacang Kedele Kecamatan Palakka sangatlah kurang karena produksi hanya bisa mencapai antara 0,2 samapi dengan 0,6 ton perhektar.

Selanjutnya, berikut ini akan dijelaskan tentang luas panen Ubi Jalar serta produksinya dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988. Untuk lebih jelasnya mengenai luas panen dan jumlah produksi, dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

T A B E L III 9
 LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI UBI JALAR
 KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984-1988

TAHUN !	LUAS PANEN (HA)	!	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1984 !	24	!	62
1985 !	13	!	40
1986 !	12	!	43
1987 !	13	!	49
1988 !	20	!	113

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone

Tabel di atas menggambarkan tentang luas panen dan jumlah produksi Ubi Jalar. Dalam hal ini Kecamatan Palakka pada tahun 1984 memiliki luas panen seluas 24 ha dengan jumlah produksi sebesar 62 ton atau rata-rata per hektar sebesar 2,6 ton. Tahun 1985 luas areal panen menurun menjadi 13 ha atau turun 0,5 % dari tahun 1984. Sedangkan produksi pada tahun 1985 mencapai 40 ton atau rata-rata produksi per hektar luas panen mencapai 3,1 ton. Ini berarti terjadi peningkatan rata-rata produksi dalam satu hektar. Tahun 1986 luas areal panen seluas 12 ha berarti turun 0,1 % dari tahun 1985. Sedangkan jumlah produksi mencapai 43 ton atau rata-

rata per hektar mampu menghasilkan Ubi Jalar sebesar 3,6 ton. Ini berarti terjadi peningkatan jumlah produksi sekalipun luas areal turun 0,1 %. Dan pada tahun 1987 luas areal seluas 13 ha dengan jumlah produksi 49 ton atau rata-rata per hektar mencapai tingkat produksi sebesar 3,8 ton. Sedangkan pada tahun 1988 luas areal panen sebesar 20 ha dengan jumlah produksi sebesar 113 ton. Jadi rata-rata perhektar menghasilkan 5,7 ton.

Melihat penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa produksi Ubi Jalar Kecamatan Palakka mempunyai prospek yang lebih baik oleh karena peningkatan jumlah produksi dalam per hektar terus meningkat sekalipun luas areal menurun. Hal ini jelas didasarkan intensifikasi yang lebih baik.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai produksi Kacang Tanah dan luas panen di Kecamatan Palakka, dan untuk lebih jelasnya serta terperinci mengenai luas dan jumlah produksi Kacang Tanah, berikut ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel.

T A B E L III 10
 LUAS PANEN DAN JUMLAH PRODUKSI KACANG TANAH
 KECAMATAN PALAKKA TAHUN 1984-1988

TAHUN !	LUAS PANEN (HA)	!	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1984 !	975	!	779
1985 !	951	!	1.055
1986 !	607	!	311
1987 !	1.254	!	1.450
1988 !	2.047	!	2.473

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone

Dalam hal luas panen dan jumlah produksi Kacang Tanah Kecamatan Palakka dapat dilihat pada tabel diatas, dimana pada tahun 1984 luas areal panen seluas 975 ha dengan jumlah produksi 779 yang berarti rata-rata perhektar menghasilkan 0,8 ton. Pada tahun 1985 luas areal panen seluas 951 dengan jumlah produksi sebesar 1.055 yang berarti rata-rata perhektar menghasilkan 1,1 ton, meningkat 0,3 ton dari tahun 1984. Pada tahun 1986 luas areal panen seluas 607 ha dengan jumlah produksi mencapai 311 yang berarti per hektar mampu menghasilkan 1,3 ton terjadi kenaikan sebesar 0,2 ton per hektar. Dan pada tahun 1987 luas areal panen seluas 1.254 de-

ngan jumlah produksi sebesar 1.450 ton yang berarti rata-rata perhektar mampu menghasilkan jumlah produksi sebesar 1,2 ton, dengan demikian terjadi penurunan rata-rata per hektar sebesar 0,1 % dari tahun 1986. Sedangkan pada tahun 1988 luas areal panen seluas 2.047 dengan jumlah produksi sebesar 2.475 atau rata-rata per hektar menghasilkan 1,2 ton

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi Kacang Tanah Kecamatan Palakka per hektar rata-rata antara 1,1 ton sampai 1,3 ton.

Demikianlah beberapa faktor produksi Kecamatan Palakka Kabupaten Bone seperti yang dipaparkan di atas. Sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dapat dilihat pada daftar lampiran skripsi ini.

Semua data-data yang telah dijelaskan di atas merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan ukuran kepada kita mengenai tingkat penghidupan masyarakat. Faktor-faktor produksi ini akan dapat pula dijadikan sebagai input dalam menghitung tingkat income Perkapita masyarakat, sehingga dengan mengetahui hal tersebut, maka dapatlah mengukur standar kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Palakka.

3.4. Kemiskinan di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Kemiskinan bukan lagi suatu bahan yang baru buat dibicarakan. Sejak berdirinya Republik ini Kemiskinan telah ada, dan hingga sekarang ini masalah tersebut masih tetap menjadi bahan diskusi dari para ahli, terutama bagi pakar-pakar sosiologi dan ekonomi.

Yang paling banyak dibicarakan dalam masalah ini adalah mengapa orang menjadi miskin dan berbagai konsekwensinya serta jalan keluarnya. Kesemuanya itu pada akhirnya menghasilkan berbagai teori-teori yang menyangkut sebab terjadinya kemiskinan, yang menghasilkan berbagai kebijaksanaan dengan upaya-upaya kemanusiaan serta tindakan-tindakan baik preventif maupun represif dengan maksud untuk menghilangkan kemiskinan tersebut.

Pada dasarnya bahwa kemiskinan yang terjadi adalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah menyangkut masalah keadaan alam, sedangkan faktor internal adalah masalah yang timbul dari diri manusia atau masyarakat itu sendiri. Faktor kedua inilah yang banyak melanda masyarakat di daerah-daerah termasuk Kecamatan Palakka. Faktor internal yang dimaksudkan disini seperti sifat boros, malas, bermasabodoh, dan sebagainya.

Oleh karena itulah masalah kemiskinan yang melanda daerah-daerah, khususnya di Kecamatan Palakka,

pada dasarnya identik dengan masalah kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Untuk itulah dalam pembahasan mengenai masalah kemiskinan di Kecamatan Palakka akan dikaitkan dengan masalah kemiskinan secara umum, dimana terdapat beberapa standar tertentu yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan itu.

Untuk dapat melihat secara pasti tingkat kemiskinan suatu masyarakat, maka pertama-tama yang harus dilihat adalah tingkat produksi masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah faktor alam, dimana masyarakat kecamatan Palakka pada umumnya bekerja sebagai petani dengan luas areal pertanian sebesar 4455 untuk areal sawah, 8.719,5 untuk tanah perkebunan. Jadi tanah yang dapat dipergunakan rakyat sebagai tanah produksi seluas 13.174,5 ha. Dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa pemilikan tanah rata-rata penduduk dengan jumlah sebesar 39.635 adalah seluas 0,3 ha per penduduk.

Melihat keterangan di atas, maka yang menjadi pembahasan pertama di dalam mengukur tingkat kemiskinan di Kecamatan Palakka adalah didasarkan pada pemilikan tanah per orang.

Sebagaimana disebutkan bahwa pemilikan tanah untuk satu orang di Kecamatan Palakka adalah seluas

0,3 hektar per penduduk. Dan sebagaimana dijelaskan pada Bab III di atas, bahwa terdapat beberapa jenis sawah dengan pola penanaman antara satu sampai dua kali setahun. Sedangkan produksi padi dalam satu hektar sawah dapat mencapai 4,0 sampai 4,5 ton per hektar. Dengan demikian setiap penduduk hanya mampu menghasilkan padi 1,2 ton sampai 1,8 ton untuk 0,3 hektar yang dimiliki oleh setiap penduduk.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapatlah dikalkulasikan bahwa tingkat produksi petani di Kecamatan Palakka dalam satu tahun dapat mencapai 2,4 sampai dengan 3,6 ton pertahun. Ini berarti bahwa jika padi atau gabah tersebut telah menjadi beras maka akan berkurang dari sudut produksi beras dalam per hektar. Atau sekitar 1,2 ton beras sampai 1,8 ton beras/tahun.

Dengan demikian, tingkat produksi petani dengan luas tanah sebesar 0,3 hektar hanya dapat mencapai antara 1,2 sampai 1,8 ton beras, yang jika diukur berdasarkan tingkat kelayakan, dimana dikatakan bahwa seseorang petani dikatakan mencapai tingkat kecukupan jika ia dapat menghasilkan 2,0 ton beras per tahun. Ini berarti bahwa produksi petani Kecamatan Palakka masih berada di bawah standar. Demikian pula seseorang dapat dikatakan miskin jika ia tidak mampu mengkonsumsi beras 320 Kg/per tahun.



Perhitungan di atas adalah didasarkan pada tingkat rata-rata seluruh penduduk. Untuk itulah perlu dijelaskan disini bahwa terdapat penduduk Kecamatan Palakka yang hanya bekerja sebagai buruh tani, artinya tidak memiliki lahan pertanian yang dapat ia gunakan di dalam memproduksi padi. Jumlah buru tani tersebut mencapai 23,5 % dari jumlah penduduk. Jumlah inilah yang boleh dikatakan mereka yang belum mampu untuk mengkonsumsi beras sebanyak 230 kg pertahun. Dengan demikian dari sudut pemilikan tanah sawah yang dapat digunakan oleh penduduk untuk memproduksi padi di Kecamatan Palakka hanya dimiliki 76,5 % dari seluruh penduduk. Sedangkan sisanya merupakan penduduk yang tidak memiliki tanah sawah atau tanah lainnya dan mereka inilah yang hidup di bawah standar kelayakan, yang secara kasarnya disebut miskin.

Kalau kita perhatikan bagaimana keadaan penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian, khususnya tanah sawah, dimana hal inilah yang menyebabkan mereka berada pada garis kemiskinan. Sebab ini merupakan sebab yang bersifat ekstern artinya faktor keadaan alam.

3.5. Faktor Penyebab Timbulnya Kemiskinan di Kecamatan Palakka.

3.5. 1. Faktor Pendidikan/Keterampilan.

Mereka yang berada pada garis kemiskinan, dapat dikatakan tidak memiliki keterampilan, ju

ga tidak adanya keterampilan yang dimiliki di sebabkan tingkat pendidikan yang dimilikinya sangat rendah bahkan boleh dikatakan tidak ada.

Dari faktor pendidikan/keterampilan inilah yang juga menentukan standar kelayakan hidup bagi mereka. Oleh karena tidak adanya keterampilan dan tingkat pendidikan rendah serta penyediaan lahan pertanian, khususnya tanah sawah membuat mereka hidup sebagai tani dengan pendapatan dibawah standar kelayakan.

3.5.2. Etos Kerja

Etos kerja juga mempengaruhi tingkat kelayakan hidup sebahagian penduduk Kecamatan Palakka. Yang dimaksudkan disini adalah cara kerja sebahagian penduduk yang pada umumnya berada dibawah standar hidup layak. Kalau diperhatikan bagaimana cara kerja mereka maka salah satu sebab mengapa mereka hidup di bawah standar kelayakan adalah juga disebabkan oleh Etos kerja (budaya kerja) mereka sendiri dimana pada umumnya mereka memiliki sifat malas, boros, dan prinsip hidup yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman seperti ha-

ri ini untuk hari ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Palakka yang masih berada dalam standar hidup layak adalah sebesar 23,5 %, dimana sebab-sebab mereka menjadi miskin adalah terdiri dari beberapa faktor tertentu yakni :

1. Jumlah lahan pertanian yang belum cukup, sehingga mereka pada umumnya hanya menjadi buruh tani.
2. Tidak adanya keterampilan serta rendahnya tingkat pendidikan, sehingga mereka hanya mengandalkan tenaganya.
3. Mentalitas yang dimiliki oleh masyarakat bukanlah mentalitas yang berorientasi pada masa depan.

B A B 4

ANALISIS DAMPAK KEMISKINAN DI KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE

4.1. Kemiskinan Sebagai Sumber Kejahatan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang juga dianggap sebagai penyakit masyarakat. Demikian pula halnya dengan kejahatan adalah termasuk masalah sosial, yang mau tidak mau harus dapat diperbaiki agar kesejahteraan hidup fapat tercapai.

Perlu pula dijelaskan disini bahwa antara kemiskinan dan kejahatan mempunyai keterkaitan yang merupakan hubungan kausal (sebab akibat), dimana yang satu merupakan sebab dan yang lain adalah akibat. Demikian pula bahwa kemiskinan dan kejahatan itu sendiri merupakan problem sosial yang pada dasarnya merupakan permasalahan kemanusiaan. Dan sebagai masalah kemanusiaan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk berupaya menyelesaikan masalah kemiskinan dan kejahatan itu.

Untuk dapat memecahkan masalah tersebut, diperlukan suatu langkah kebijaksanaan dengan maksud apa yang dilaksanakan itu tidak bersifat tambal sulam, tetapi hendaknya merupakan suatu penyelesaian secara keseluruhan.

Dalam hal ini kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone pada khususnya dan daerah-dae

daerah lain pada umumnya adalah disebabkan oleh beberapa faktor, demikian pula halnya dengan kejahatan juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah kemiskinan.

Sebab mengapa orang melakukan kejahatan dapat terjadi oleh karena adanya tekanan-tekanan ekonomi, serta keinginan untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari kesemuanya itu juga merupakan faktor pendorong mengapa orang melakukan kejahatan.

Dalam hubungannya dengan tekanan-tekanan ekonomi dimana kehidupan sekarang ini menghendaki adanya kebutuhan hidup yang cukup tinggi, mereka yang tidak mampu untuk mencukupi hidupnya sekalipun dalam bentuk hidup sederhana akan merasa tertekan, dengan tekanan-tekanan inilah mereka akan berusaha untuk keluar dari tekanan-tekanan tersebut. Sudah menjadi watak manusia untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan segala cara sekalipun sekalipun mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran norma di dalam tatanan masyarakatnya.

Disinilah awal mulanya timbul tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mendapat tekanan-tekanan ekonomi. Sementara faktor kebutuhan hidup juga memancing mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Demikian pula faktor kesempatan yang ada untuk melakukan kejahatan itu tersedia.

Khususnya di Kecamatan Palakka, mereka yang melakukan kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan dan pembunuhan adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas tadi, dalam garis besarnya adalah disebabkan oleh faktor kemiskinan.

Berdasarkan pada hasil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone, didapatkan bahwa dari seluruh jumlah Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berasal dari Kecamatan Palakka adalah bersumber dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Jumlah narapidana yang berasal dari Kecamatan Palakka sebanyak 17 orang atau 13 % dari keseluruhan narapidana di Kabupaten Bone. Dari ke 17 narapidana tersebut yang sempat penulis wawancarai sebanyak 10 orang. Berikut ini akan dijelaskan sebab-sebab mengapa ke 10 orang narapidana tersebut menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone. Tetapi sebelumnya ada baiknya sebab-sebab ke 10 orang narapidana itu melakukan kejahatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL IV 1

JUMLAH NARAPIDANA YANG BERASAL DARI
KECAMATAN PALAKKA DIRINCI MENURUT
SEBAB - SEBAB MELAKUKAN KEJAHATAN.

No.	Jenis Kejahatan	Sumber Kejahatan					Jumlah
		Tekanan Ekonomi	Harga diri	Sirik	lain lain		
1	Pembunuhan	2 org	1 org	-	-		3
2	Penganiayaan	3 org	1 org	-	-		4
3	Pencurian	3 org	-	-	-		3
4	Lain - lain	-	-	-	-		-

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kab. Bone.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bahwa jumlah pelaku kejahatan sebanyak 10 orang dengan perincian bahwa yang melakukan tindakan pembunuhan sebagai akibat tekanan ekonomi sebanyak 2 orang atau 20 %. Pembunuhan yang dilakukan kedua orang ini adalah dalam keadaan terpaksa, dimana pada awalnya mereka hanya bermaksud mencuri, tetapi keadaan yang terdesak itu mereka melakukan pembunuhan terhadap korban pencuriannya. Sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah disebabkan korban melakukan perlawanan. Kemudian yang melakukan pencurian juga disebabkan tekanan ekonomi dimana mereka melakukannya karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan berdasarkan hasil wawancara ternyata bahwa pada umumnya mereka adalah tidak memiliki pendidikan serta keterampilan yang cukup sehingga untuk bekerja dengan mengharapkan pendidikan serta keterampilan sudah barang tentu tidak akan diterima. Disam -

ping itu tenaga yang mereka miliki tidak dapat mereka pergunakan, oleh karena tanah pertanian untuk digarapnya tidak ada sama sekali. Dan yang lebih parah lagi adalah sikap mental yang mereka miliki adalah sikap mental yang bersifat negatif. Ditambah lagi pengaruh sikap perkotaan yang menjadikan mereka mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu ia capai. Hal-hal inilah yang menjadikan mereka dapat melakukan kejahatan tersebut.

4.2. Kemiskinan Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

Sudah sewajarnya arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bone khususnya pemerintahan Kecamatan Palakka adalah sejalan dengan pembangunan nasional. Karena dengan demikian kebijaksanaan program pembangunan akan diarahkan di berbagai sektor pembangunan dengan melihat prioritas tertentu. Demikian pula bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu berorientasi pada masalah-masalah pembanguna itu sendiri. Dengan terciptanya arah serta kebijaksanaan pada pembangunan yang seperti itu akan memberikan suatu model pembangunan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan dan berintegrasi pada program pembangunan dan masalah pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Palakka merupakan pembangunan di segala bi-

dang dengan prioritas program yang berorientasi pada masalah-masalah pembangunan itu sendiri.

Salah satu masalah pembangunan itu adalah masalah kemiskinan, sebagaimana disebutkan di atas bahwa penduduk Kecamatan Palakka yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 26,5 %. Untuk itulah, salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Kecamatan Palakka adalah dengan melihat hubungan antara masalah kemiskinan yang dihadapinya dengan program-program pembangunan yang dilaksanakannya.

Dalam rangka itulah program pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Palakka adalah dikaitkan dengan usaha-usaha peningkatan taraf hidup masyarakatnya, khususnya bagi mereka yang berada di bawah standar kelayakan hidup.

Untuk lebih jelasnya mengenai keberhasilan pembangunan dalam hubungannya dengan masalah kemiskinan di Kecamatan Palakka, dapat dilihat dalam beberapa program pembangunan yang telah direalisasikan, seperti berikut ini

1. Pembangunan di bidang ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi ini berbagai program telah dilaksanakan, seperti pertanian, Perikanan, perkebunan, peternakan dan lain-lain, baik program intensifikasi maupun program ekstensifikasi.

Kesemua bidang-bidang pembangunan ekonomi

tersebut di arahkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Kecamatan Palakka. Dan untuk melihat tingkat tingkat keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi, khususnya pertanian dapat dilihat pada bab III skripsi ini.

Kalau dilihat dari sudut pertumbuhan ekonomi dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Palakka, maka pertumbuhan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL IV 2
PERTUMBUHAN PDRB KECAMATAN PALAKKA
DARI TAHUN 1986 - 1988(%)

Tahun	!	Pertumbuhan PDRB	!	%
1986	!	2,83	!	
1987	!	1,77	!	
1988	!	5,19	!	
Jumlah	!	9,79	!	

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

Dari data tabel tersebut, menunjukkan bahwa dari sudut pertumbuhan ekonomi dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka boleh dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan



ekonomi Kecamatan Palakka masih cukup lamban , dibanding dengan pertumbuhan Kecamatan-kecamatan lainnya.

Perlu pula dijelaskan disini pertumbuhan riil PDRB Kecamatan Palakka adalah sebesar 5,2 % dari tahun 1987 - 1988.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kecamatan Pallak masih cukup lamban.

2. Program Pembangunan di Bidang Kesehatan

Dalam program ini Kecamatan Palakka telah mendirikan beberapa sarana Kesehatan seperti Puskesmas dan poliklinik serta beberapa tenaga medis seperti Dokter dan mantri yang boleh dikatakan dapat melayani kebutuhan masyarakat Kecamatan Palakka.

3. Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program ini telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan kepada mereka yang tidak mampu baik berupa materi seperti barang-barang kebutuhan pertanian dan spirituil seperti pendidikan keterampilan.

4. Dan program-program pembangunan lainnya yang searah dengan program-program pembangunan ma-

syarakat desa dan disesuaikan dengan program pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dengan melihat program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palakka dan dihubungkan dengan masalah kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut akan terkesan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat telah cukup untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di daerahnya. Namun demikian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan sebesar 26,5 %. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Palakka belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut.

Tidak berhasilnya pembangunan di Kecamatan Palakka dalam mengatasi kemiskinan adalah sebenarnya juga tidak terlepas dari faktor subyektif dari mereka yang berada dalam garis kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Palakka adalah pada dasarnya dapat memberikan harapan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian, dimana disebutkan pada bab III bahwa lahan/tanah yang belum diusahakan seluas 40 Hektar. Juga terdapat potensi-potensi lain, seperti perikanan dan peternakan yang dapat memberikan pendapatan yang cukup.

4.3. Hukum Sebagai Pemecahan Dampak Kemiskinan

Dalam membicarakan hukum sebagai salah satu cara untuk menanggulangi dampak kemiskinan, maka akan lebih banyak berorientasi pada sosiologi hukum atau membicarakan hukum sebagai konteks sosial. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam pembahasan berikut ini, yang menyangkut tentang fungsi hukum sebagai sosial engineering.

Sehubungan dengan hal itu, maka pembahasan akan dimulai dari Hukum sebagai norma sosial.

Dengan adanya hukum sebagai norma sosial ini menandakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pengatur masyarakat atau dengan kata lain bahwa hukum merupakan salah satu proses yang berlangsung dalam masyarakat. Dimana ditentukan bahwa keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai oleh karena proses proses di dalamnya, yaitu yang terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat yang dilaksanakan menurut suatu pola tertentu.

Semakin tinggi tingkat prosentase orang yang berpegangan atau mematuhi pola tersebut semakin tertib pula keadaan masyarakatnya. Dalam hal ini hukum sebagai norma sosial, dimana berfungsi untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi anggota masyarakat dalam melakukan hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sa-

tu dengan anggota masyarakat lainnya.

Dalam hubungannya dengan hukum sebagai pemecahan masalah kemiskinan adalah menyangkut tentang persoalan keadilan. Hal ini bukan berarti bagi masyarakat atau penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan akan mendapat sanksi hukum, melainkan dengan adanya aturan-aturan hukum tersebut mereka yang mempunyai pendapatan rendah mungkin tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Demikian pula sebaliknya bagi mereka yang mempunyai penghasilan yang tinggi akan dikenakan pajak penghasilan yang sesuai dengan pendapatannya. Dan dari pendapatan pajak itulah dapat dibangun berbagai sarana-sarana pembangunan desa yang dapat digunakan oleh masyarakat desa itu sendiri, khususnya bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan.

Berbicara masalah keadilan, berbagai pendapat dari para ahli akan bermunculan dengan perbedaan-perbedaan sudut pandang masing-masing. Namun sebelum dibahas mengenai pendapat para ahli tersebut, ada baiknya jika diketahui terlebih dahulu tentang beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fungsi hukum di dalam memecahkan masalah kemiskinan yang dihubungkan dengan masalah pembagian sumber-sumber daya. Karena hal ini dapat memberikan gambaran kepada kita tentang suatu distribusi sumber daya alam. Beberapa pertanyaan tersebut

adalah :

1. Kepada siapakah sumber-sumber daya itu diberikan/dibagikan ?
2. Seberapa besarkah bagian yang diberikan kepada masing-masing penerima ?
3. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bagian itu ?

Dari ketiga pertanyaan tersebut jika dihubungkan dengan ukuran tertentu untuk menentukan bagaimana masalah-masalah di atas dipecahkan maka hal itu berarti kita telah memasuki persoalan keadilan. Dan dalam rangka itu pula, persoalan kemiskinan dapat dipecahkan melalui aturan-aturan hukum. Jadi persoalan keadilan yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dan masalah kemiskinan merupakan dua hal yang dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan itu sendiri.

Menurut Ulpianus dalam buku Prof. Dr. Satjipto Raharjo (1986 : 49) dikemukakan bahwa yang dimaksud keadilan adalah :

"kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus, untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya"

Sedangkan menurut Aristoteles didalam mendekati masalah keadilan adalah didasarkan pada persamaan, di mana azas ini menghendaki agar sumber daya di dunia

ini diberikan atas azas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Jadi Aristoteles memandang hukum dari sudut fungsinya adalah untuk menjaga agar sumber daya di dunia ini di dalam membagikan kepada anggota masyarakat senantiasa terjamin dan dilindungi.

Menurut Roscoe Pound dalam buku Satjipto Raharjo (1986 : 50) mengemukakan bahwa :

"melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat, ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya"

Pendapat Roscoe Pound ini dimaksudkan bahwa semakin meluasnya Pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, maka semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha juga semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering yang semakin efektif.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat kiranya dikemukakan bahwa sekalipun hukum itu langsung dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagi-bagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menja

di landasannya, yaitu pertanyaan tentang mana yang adil ? dan apakah keadilan itu ?.

Untuk itulah hukum dalam hal ini berusaha untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya kedalam bentuk-bentuk yang konkret, berupa pengalokasian sumber-sumber daya kepada anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian hukum yang berfungsi sebagai salah satu norma sosial terutama dalam hal pembagian sumber-sumber daya akan dapat memecahkan persoalan kemiskinan dengan berorientasi pada konsep keadilan.

Namun demikian apa yang telah dijelaskan di atas juga masih merupakan konsep atau ide yang bersifat abstrak. Untuk itulah dalam rangka merealisasikan konsep tersebut dengan maksud untuk memecahkan masalah kemiskinan, khususnya di Kecamatan Palakka maka hukum disini dapat dilihat dari sudut institusi sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo (1986 : 148) bahwa :

"Melihat hukum sebagai suatu institusi sosial adalah mengamati dan membicarakan semua struktur dan proses yang berhubungan dengan kegiatan dan proses perwujudan tujuan hukum"

Selanjutnya dikatakan bahwa kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemandapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan itu. Keadaan ini mengandung arti , bahwa dalam masyarakat tidak

lagi terdapat kesimpang siuran tentang siapa yang berwenang untuk menentukan batas-batas dan isi dari hubungan-hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam kaitannya dengan tuntutan dan pemberian keadilan itu. Apabila batas-batas yang demikian itu tidak ditentukan, sudah barang tentu akan terjadi keributan dan pemborosan tenaga masyarakat.

Selanjutnya pula hukum dapat memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yang telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan demikian, disini kita melihat, betapa tuntutan kebutuhan yang bersifat pribadi itu bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat, yaitu berupa kerangka sosial tersebut.

Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisir. Melalui norma-norma tersebut, terjelmalah posisi-posisi yang kait-mengkait secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan kebutuhan tersebut. Keadaan yang demikian itu terjelma, oleh karena norma-norma tersebut me-

netapkan tentang posisi masing-masing anggota masyarakat dalam hubungan dengan suatu pemenuhan kebutuhan tertentu dan bagaimana kaitannya dengan posisi masyarakat lainnya.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memecahkan masalah kemiskinan maka hukum dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

1. Hukum sebagai Norma Sosial
2. Hukum sebagai Institusi Sosial
3. Hukum Sebagai sarana merubah masyarakat
4. Hukum sebagai pengatur sumber-sumber daya.

Dengan melihat hukum dari keempat sudut tersebut maka dapatlah persoalan kemiskinan dipecahkan. Namun demikian Pemecahan tersebut masih bersifat konsep atau ide yang diungkapkan, jadi masih bersifat teoritis. Untuk itulah dengan berdasar pada konsep-konsep tersebut di atas maka dapatlah kita menyusun sarana-sarana yang dapat berfungsi sebagai instrumen masyarakat, khususnya pemerintah Kecamatan Palakka untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kejahatan. Berikut ini akan dijelaskan secara sistematis untuk dapat merealisasikan konsep-konsep di atas dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan dan kejahatan.

4.3.1. Memecahkan Masalah Kemiskinan

Berbagai cara untuk dapat memecahkan kemiskinan, namun hingga sekarang ini kemiskinan masih tetap bercokol dalam kehidupan masyarakat, Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui fungsi-fungsi hukum. Ini dalam rangkaian konteks sosial hukum. Dan berdasarkan pada konsep-konsep sosial hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapatlah dijelaskan seperti berikut ini.

Pertama-tama yang harus kita lihat adalah tempat pengadilan, dimana pengadilan inilah mewakili fungsi integrasi yang dilakukan oleh sub sistem sosial seperti ekonomi, keamanan, ketertiban dan lain-lain. Integrasi ini dilakukan dengan menggarap masukan-masukan tadi dari sub-sistem yang akan menjadi keluaran-keluaran. Hukum disini sebagai pengintegrasi yang dalam hal ini adalah pengadilan yang dapat mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendirisendiri, bahkan saling bertentangan satu sama lain ke dalam satu hubungan yang tertib dan dengan demikian dapat menjadi produktif bagi masyarakatnya.

Selanjutnya sub-sub sistem seperti ekonomi

ilmu dan teknologi dan lain-lain yang meliputi semua kegiatan dalam rangka menggarap sumber daya alam untuk pemanfaatan manusia. Dengan demikian akan terjadi benturan-benturan kepentingan sehingga memberi isyarat kepada sub sistem sosial dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan, agar sengketa yang terjadi diselesaikan. Keluaran dari penyelesaian itu berupa penertiban terhadap hubungan kepentingan yang tidak serasi, baik berupa hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pertanggungjawaban, penggantian kerugian, dan sebagainya.

Sedangkan dalam pencapaian tujuan yang dilakukan oleh sub sistem politik, maka sub sistem sosial memberikan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa yang timbul mengenai sahnya suatu tujuan atau perumusan dari tujuan tersebut.

Untuk dapat lebih jelasnya mengenai penjelasan tersebut, maka berikut ini dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Masukan Dari Fungsi

Proses Fungsional oleh :

Bentuk Keluarannya :

Adaptasi
(Ekonomi)

Pertataan kembali proses produktif dalam masyarakat.

Pengejaran Tujuan
(politik)

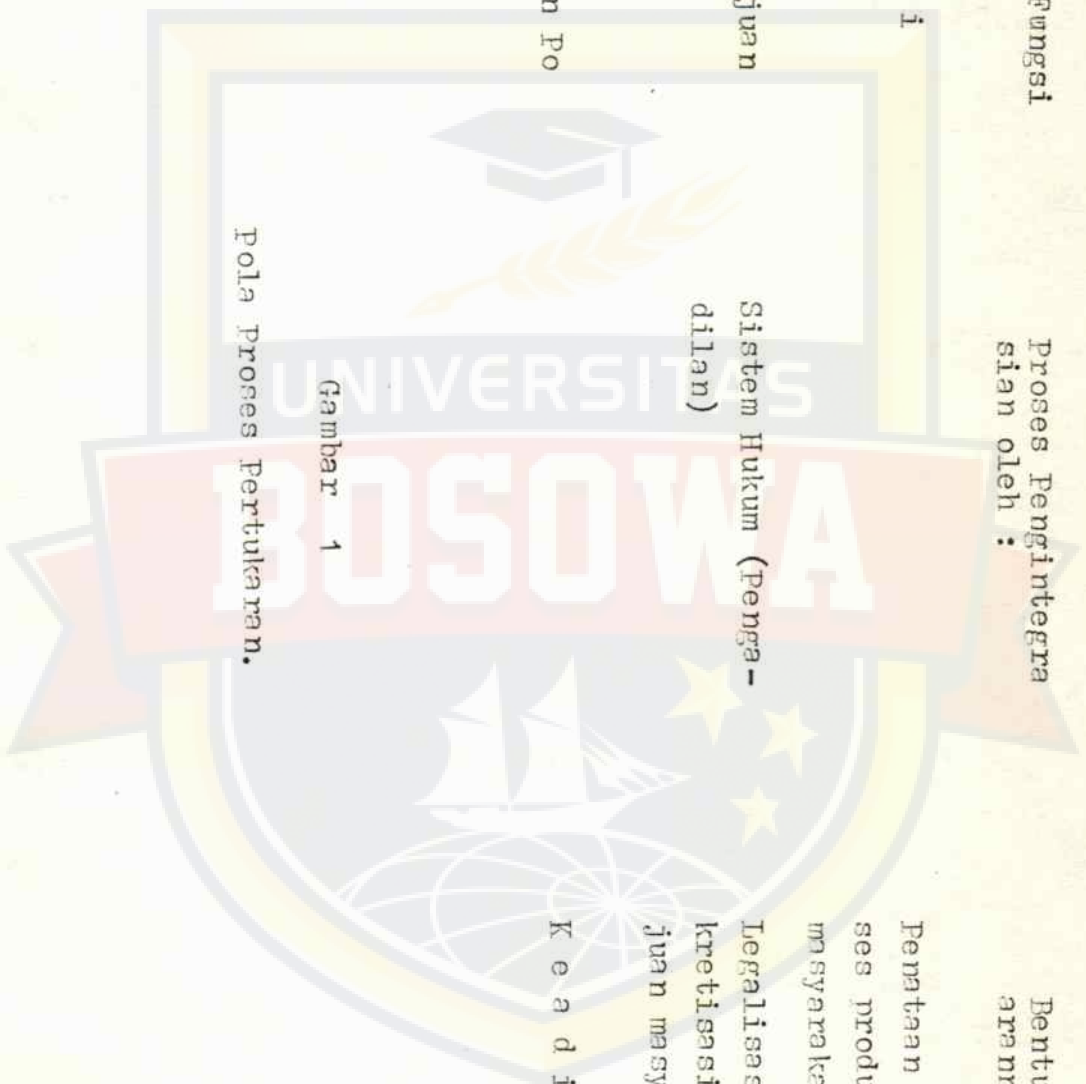
Legalisasi dan konkretisasi tujuan-tujuan masyarakat

Memertahankan Pola
(Budaya)

Keadilan

Pola Proses Bertukaran.

Gambar 1



4.3.2. Pemecahan Masalah Kejahatan

Masalah kejahatan merupakan persoalan langsung bagi hukum sehingga untuk dapat memecahkan masalah kejahatan itu telah ada saran-sarana tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan, dimana dapat berfungsi sebagai rehabilitasi atau memperbaiki mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga setelah mereka keluar dari Lembaga tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi disini kita melihat hukum sebagai institusi sosial

Hukum juga dapat berupa suatu tindakan preventif yakni melalui norma-norma atau kaedah-kaedah yang dibuatnya dan disertai dengan sanksi sehingga orang yang akan melakukan tindak kejahatan akan berfikir dengan melihat sanksi-sanksi tersebut.

B A B 5

P E N U T U P

5.1. S i m p u l a n

Berdasarkan penjelasan-penjelasan serta uraian - uraian dari keseluruhan isi skripsi ini, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut ini :

1. Bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah pembangunan nasional, yang dapat menghambat pembangunan itu sendiri apabila masalah tersebut masih tetap ada atau dengan kata lain bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang harus diselesaikan sehingga laju pembangunan nasional dapat terus berkesinambungan.
2. Bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang juga merupakan salah satu sumber dari timbulnya kejahatan, maka semua unsur harus dilibatkan, salah satu diantaranya adalah meninjaunya dari sudut hukum, dimana hukum dipandang sebagai social control atau social ingeneering.
3. Bahwa dengan melihat hukum sebagai social control dan social ingeneering (rekayasa sosial) maka masalah kemiskinan dan kejahatan akan dapat dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif maupun represif melalui hukum, dimana hukum dapat

- dilihat sebagai norma sosial, sebagai institusi sosial dan hukum sebagai sarana merubah masyarakat .
4. Khususnya di Kecamatan Palakka, dimana masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan kurang lebih 26,5 %, maka sarana-sarana hukum seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat khususnya dan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bone pada umumnya di dalam memecahkan masalah kemiskinan. Demikian pula pada masalah kejahatan yang ditimbulkan oleh kemiskinan dapatlah dicegah melalui sarana-sarana hukum baik yang bersifat preventif maupun represif.
 5. Namun demikian bahwa untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kejahatan tidak hanya cukup dengan melalui sarana-sarana hukum yang ada melainkan harus ditunjang oleh berbagai sektor lainnya seperti peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituilnya , dan berbagai sektor-sektor lainnya yang dapat mendukung.

5.2. Saran

Setelah mengadakan penelitian serta melihat penjelasan-penjelasan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa sumbang saran yang mungkin dapat berguna

bagi pemerintah Kecamatan Palakka pada khususnya dan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone pada umumnya. Ada - pun saran-saran yang dapat kami berikan adalah seba - gai berikut :

1. Untuk dapat mengurangi tindak kejahatan yang ada di Kecamatan Palakka maka diperlukan suatu tindakan baik yang bersifat preventif maupun represif dengan menggunakan berbagai bidang atau sektor termasuk sektor hukum.
2. Untuk dapat melakukan hal tersebut maka pemerintah setempat dapat memanfaatkan sarana-sarana hukum sebagai norma sosial, yakni dengan memberikan penerangan-penerangan dibidang hukum, demikian pula pemanfaatan hukum sebagai sarana merubah masyarakat, yakni dengan merubah pola pikir dan etos kerja masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifian, 1984, Transformasi Sosial Budaya, Jakarta: Gramedia.
- Ali, Achmad, 1988, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Ujung Pandang : Lembaga Penerbitan Unhas.
- Beremer M. Harvey, 1986. Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.
- Gurvitch, George., 1988 (diterjemahkan) Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab., Sosiologi Hukum, Jakarta : Bhra-tara.
- Koentjaraningrat., 1985, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : Gramedia.
- Kuntowijoyo., 1987, Budaya Masyarakat, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Kusuma, Mulyana W., 1986 Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kusuma, Mulyana W., (dkk), 1989, Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum, Jakarta : Yayasan LBHI.
- Mertokusumo, Sudikno., 1985, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty .
- Raharjo Satjipto., 1986 Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa.
- _____. , 1986, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni
- Redfield, Robert., 1985, (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial)terjemahan, Masyarakat Petani dan Kebudayaan, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono., 1985. Evektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung : Remaja Karaya.

_____. 1981. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Ka-
langan Hukum. Bandung : Alumni.

Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1982. Sosiologi
Hukum dalam Masyarakat. Jakarta : Rajawali Pers.

_____. , 1986, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakar
ta :CV. Rajawali.



CABANG PERWAKILAN BIRO PUSAT STATISTIK
KANTOR STATISTIK KABUPATEN BONE
JALAN MAKASSAR NO. TLP.54
WATAMPONE

Watampone, 20 Nopember 1990

Nomor : 73 112 617
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI PENELITIAN
AN ERNI GENDA

Kepada Yang Terhormat

Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas 45
Di Ujung Pandang.-

Bersama ini disampaikan kepada bapak, bahwa :

N a m a : ERNI GENDA
SPB / NIRM : 4586060087/871139844
Jurusan : Fakultas Hukum
Universitas : 45 Ujung Pandang

benar telah melakukan penelitian kepustakaan di Instansi kami se-
lama bulan Oktober hingga Nopember 1990

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.-

embusan :

Yth. Bapak Rektor Universitas 45

Di Ujung Pandang

Yth. Sdri. ERNI GENDA

Pertinggal



SURAT - KETERANGAN

Nomor: W15.E3-PK.04.07-1327

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : ERNI GENDA
Nomor Stb/Program : 4586060087
J u r u s a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
A l a m a t : Perumnas Antang No.6

Yang bersangkutan benar telah mengadakan penelitian / Pengumpulan Data /
inter viuw :

Pada tanggal : 3 Oktober s/d 16 Oktober 1990.
Bertempat di : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Watampone

Untuk bahan penyusunan Skripsi dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana
Lengkap pada UNIVERSITAS " 45 " di Ujung Pandang

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya.-

Watampone, 16 Oktober 1990.-

Ynt. KEPALA,

KINAS MAP.
NIP. 040018279.-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE
KANTOR KECAMATAN PALAKKA
DI BULU TEMPE

SURAT - PENGANTAR

NO. 045.2 / 513 / PLK / X / 1990

Yang bertanda tangan dibawa ini, menerangkan bahwa :

Nama : ERNI GENDA
NO Stb/Program : 4586060087.
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
Alamat : Perummas Antang No.6 Ujung Pandang

Yang bersangkutan benar telah mengadakan Penelitian / Pengumpulan Data / -
interview :

Pada Tanggal : 4 Oktober s/d 25 Oktober 1990.
Bertempat di - : Kantor Camat Palakka.

Untuk bahan Penyusunan Skripsi dalam rangka Penyelesaian Studi Program -
Sarjana Lengkap pada UNIVERSITAS " 45 " di Ujung Pandang

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.-

Bulu Tempe, 25 - 10 - 1990



(ANDI TERBIT IBRAHIM.BA)
NIP. 010 032 268.-